



Pelaksanaan FCP oleh APP Masih Belum Memadai

*Pernyataan Bersama Kelompok Masyarakat Sipil
mengenai 5 Tahun Forest Conservation Policy (FCP) - Asia Pulp and Paper (APP)*

5 Februari 2018 – Menandai peringatan 5 tahun Asia Pulp and Paper (APP) menyatakan komitmen Forest Conservation Policy (FCP), kelompok-kelompok masyarakat sipil yang logonya ditampilkan bersama pernyataan ini menyampaikan pernyataan bersama bahwasanya APP belum berada pada jalur yang tepat dan kemajuan pelaksanaan komitmen tersebut belum memadai.

1. Ketidacukupan pasokan dari hutan tanaman dan keterlibatan dalam deforestasi

Walau FCP menegaskan berhentinya perusahaan menggunakan kayu dari hutan alam, akan tetapi Sinar Mas Group (SMG) atau APP justru menggalang pendanaan dan mengurus perizinan untuk membangun pabrik bubur kertas baru yang berpotensi meningkatkan konsumsi kayu sebesar 84%.^{1, 2} Hutan tanaman milik APP belum pernah memproduksi kayu sebanyak itu, dan perhitungan kelompok masyarakat sipil menunjukkan bahwa konsesi-konsesi tersebut takkan mampu memenuhinya, kecuali bila tanpa prinsip-prinsip kelestarian.³ Bila pasokan kayu tersendat, dikhawatirkan APP akan kembali menghabiskan hutan alam, dan memperparah dampak lingkungan dan sosial. Padahal, selama 5 tahun terakhir, SMG/APP terus kehilangan area konservasinya karena deforestasi oleh pihak ketiga.⁴ Bahkan, liputan Associated Press dan Straits Times mengungkap bahwa HTI PT. Muara Sungai Landak (MSL), yang setidaknya sejak 2014 melakukan pembabatan hutan alam dan membuka lahan gambut di Kalimantan Barat, ternyata terhubung dengan Sinar Mas Forestry, meski APP menyangkal keterhubungan tersebut.^{5, 6, 7, 8, 9}

2. Kelambanan resolusi konflik terhadap masyarakat

APP menyatakan telah menyelesaikan lebih dari 42 persen konflik dengan masyarakat.¹⁰ Namun, tidak disampaikan ke publik berapa jumlah seluruh konflik, berapa banyak yang telah diselesaikan, dan bagaimana penyelesaiannya. Padahal, informasi-informasi tersebut telah berulang kali diminta oleh kelompok masyarakat sipil ke APP. Mengacu pada pengalaman kelompok-kelompok yang selama ini mendampingi masyarakat yang terkena dampak kehadiran APP di Riau, Jambi dan Sumatra Selatan, hanya sedikit dari ratusan konflik tersebut yang telah selesai. Pada kasus-kasus yang telah mencapai kesepakatan, masih saja terdapat ganjalan mengenai kualitas dan pelaksanaan kesepakatan tersebut. Tak hanya itu, banyak komunitas yang selama ini kehilangan lahan, hutan, dan sumber pencaharian karena beroperasinya APP bahkan

tak mengetahui adanya komitmen perusahaan yang menyatakan mengakui hak mereka dan menyelesaikan keluhan-keluhan masyarakat.

3. Kelambanan restorasi dan pertukaran konsesi dalam gambut terdegradasi dengan tanah mineral yang potensial mengganggu hutan alam dan wilayah kelola masyarakat

Satu tahun setelah deklarasi FCP, pada 2014 APP menyatakan komitmen merestorasi 1 juta hektar ekosistem di Indonesia – lagi-lagi, tanpa disertai rencana yang jelas dan tolok ukur kemajuan pelaksanaannya. Pemasok kayu APP telah menyebabkan kerusakan besar di banyak daerah prioritas pemulihan gambut yang dicanangkan pemerintah Indonesia, sehingga pembangunan hutan tanaman dengan cara pengeringan gambut harus dihentikan, dan segera memulihkannya.¹¹ Tapi, APP tidak memiliki rencana kelola gambut secara berkelanjutan, baik untuk aktivitas ekonomi tanpa pengeringan lahan gambut¹² ataupun pemulihannya dengan vegetasi alami, demi mengendalikan kontribusi APP terhadap perubahan iklim dan menghentikan penurunan permukaan lahan gambut yang dapat menyebabkan banjir.¹³ Opsi pertukaran lahan (*land swap*) sebagai kompensasi pada tanah mineral yang disediakan pemerintah kepada perusahaan ini berpotensi meningkatkan deforestasi atau konflik dengan masyarakat. APP saat ini telah menguasai setidaknya 2,6 juta hektar lahan di Indonesia, tapi mekanisme ini membuka ruang penambahan ratusan ribu hektar dalam kendalinya yang diperoleh tanpa melalui proses transparan atau pantauan public apakah area tersebut berupa hutan alam ataukah telah dikelola oleh masyarakat.

4. Tidak akurat menginformasikan hubungannya dengan pemasok kayu dan kurang transparan mengenai hal-hal kunci pelaksanaan FCP

Sebelum dan sesudah pengumuman FCP pada 2013, APP tidak menyampaikan informasi utuh ke parapihak mengenai hubungannya dengan 27 perusahaan pemasoknya dan menyebut mereka sebagai “independen”, dengan menyembunyikan hubungannya setidaknya dengan 25 perusahaan diantaranya.¹⁴ Saat bencana kebakaran 2015, APP memakai klaim “independen” tersebut untuk berkelit dari tanggung jawab atas kebakarung besar yang terjadi di areal konsesi di sekitar pabrik barunya (OKI Mill).¹⁵ Selain terhadap PT. Muara Sungai Landak sebagaimana disebut di atas, Associated Press dan Sraits Times pun melaporkan perihal SMG/APP yang menyembunyikan hubungannya sejak 2013 dengan PT. Bangun Rimba Sejahtera di Bangka Belitung.¹⁶ Bahkan, sejak pengumuman FCP APP pun telah mengelabui parapihak mengenai informasi penting terkait pelaksanaan FCP, seperti kapasitas sesungguhnya OKI Mill, dan pada kenyataannya membangun pabrik berkapasitas jauh lebih besar tanpa bukti meyakinkan akan adanya pasokan yang memadai secara berkelanjutan.¹⁷ Perilaku APP yang seperti ini sungguh memperbesar jurang kepercayaan dengan kelompok masyarakat sipil, termasuk yang telah bekerjasama dengan APP dalam pelaksanaan FCP tersebut.

5. Minim pemantauan independen

Sejak diluncurkan, tidak ada verifikasi independen terhadap kemajuan pelaksanaan FCP.¹⁸ Namun begitu, APP justru terus menerus menyampaikan klaim sepihak kemajuan-tanpa-verifikasi tersebut melalui kampanye pemasarannya. Meski kelompok masyarakat sipil meyakini bahwa sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC) merupakan cara terbaik mendapatkan verifikasi independen dan obyektif perihal kinerja lingkungan, sosial, dan tatakelola perusahaan¹⁹, namun perangkat ini tidak dapat dipakai saat ini, baik terhadap SMG/APP, afiliasinya maupun mitra-mitra pemasoknya, karena FSC memutus hubungan (*disassociation*) dengan APP pada tahun 2007 sehubungan dengan kerusakan hutan besar-besaran yang disebabkan perusahaan ini, yang menempatkannya menjadi perusahaan pertama dari sejumlah

kecil perusahaan yang di-disasosiasi oleh FSC.²⁰

Sehubungan dengan hal-hal di atas, kelompok masyarakat sipil merekomendasikan APP agar:

1. Membuka data mengenai produksi bubur kertas dan pasokan kayunya kepada audit independen dan melibatkan setidaknya kelompok masyarakat sipil yang menyampaikan pernyataan ini sebagai pemantau (*observer*) pada saat pelaksanaan audit.
2. Membuka data rinci mengenai konflik lahan yang terdapat di seluruh konsesi APP dan perusahaan pemasoknya, termasuk data jumlah konflik, berapa banyak yang telah diselesaikan, standar dan proses yang digunakan untuk menyelesaikan masing-masing konflik tersebut, serta menyelesaikan semua konflik yang ada dengan tatawaktu yang disepakati bersama dengan masyarakat korban dan terdampak.
3. Menyampaikan secara terbuka area-area potensial untuk pertukaran lahan (*land swap*) hingga peninjauan pasokan kayu sebagaimana diamanatkan FCP dan melibatkan setidaknya kelompok masyarakat sipil yang menyampaikan pernyataan ini sebagai pemantau (*observer*) peninjauan tersebut.
4. Menyampaikan secara terbuka rencana rinci perihal meninggalkan (*phasing-out*) pengeringan gambut di konsesinya, melaksanakan rencana tersebut sebagai pertanggungjawaban restorasi terhadap gambut yang telah dirusak selama ini, bahkan bila pun telah beroleh area tukar (*swapped for new areas*).
5. Menyampaikan secara terbuka keterhubungan apapun yang ada antara APP, Sinar Mas, dan siapapun staf atau pengurus perusahaan dengan konsesi kehutanan lainnya di Indonesia guna membuka jejak lingkungan dan sosialnya.
6. Menyetujui penerapan *roadmap* pengakhiran keterputusan (*disassociation*) dengan FSC yang dibangun oleh FSC dengan dukungan dan masukan kelompok masyarakat sipil, termasuk yang menyampaikan pernyataan bersama ini.

¹ Straits Times (23 June 2017) APP mill can produce far more than expected, stoking worries.

<http://www.straitstimes.com/singapore/environment/app-mill-can-produce-far-more-than-expected-stoking-worries>

² Joint NGO Report (19 April 2014) Will Asia Pulp & Paper default on its “zero deforestation” commitment? An assessment of wood supply and plantation risk for PT OKI Pulp & Paper Mills’ mega-scale project in South Sumatra, Indonesia <http://assets.worldwildlife.org/publications/871/files/original/OKI-Mill-Report.pdf?1461160101>

³ Joint NGO Report (19 April 2014) Will Asia Pulp & Paper default on its “zero deforestation” commitment?

⁴ Rainforest Alliance (5 February 2015) An Evaluation of Asia Pulp & Paper’s Progress to Meet its Forest Conservation Policy (2013) and Additional Public Statements. <https://www.rainforest-alliance.org/sites/default/files/uploads/4/150205-Rainforest-Alliance-APP-Evaluation-Report-en.pdf>

⁵ Associated Press (20 December 2017) AP Exclusive: Pulp giant tied to companies accused of fires

<https://www.apnews.com/fd4280b11595441f81515daef0a951c3>

⁶ Asia Pulp & Paper (22 December 2017) Asia Pulp & Paper (APP)’s Response to the Associated Press (AP) Articles.

<http://www.asiapulppaper.com/news-media/press-releases/asia-pulp-paper-apps-response-associated-press-articles>

⁷ Asia Pulp & Paper (29 December 2017) Asia Pulp & Paper (APP) further refutes allegations and announces it will invite stakeholders to review the facts in relation to the allegations made. <http://www.asiapulppaper.com/news-media/press-releases/asia-pulp-paper-app-further-refutes-allegations-and-announces-it-will-invite-stakeholders-review-facts-relation-allegations-made>

⁸ Straits Times (22 December 2017) Rebutting media reports, pulp giant APP claims links to suppliers do not weaken its sustainability efforts. <http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/rebutting-media-reports-pulp-giant-app-claims-links-to-suppliers-do-not-weaken-its>

-
- ⁹ Eyes on the Forest (December 2015) Penebangan hutan alam gambut oleh PT. Muara Sungai Landak mengancam ekosistem dan habitat Orangutan. <http://eyesontheforest.or.id/uploads/default/report/Eyes-on-the-Forest-Laporan-Investigatif-PT-MSL-mengancam-ekosistem-Orangutan-Desember-2015.pdf>
- ¹⁰ Asia Pulp & Paper (13 March 2017) APP marks four-year anniversary of its Forest Conservation Policy <http://asiapulp.com/news-media/press-releases/app-marks-four-year-anniversary-its-forest-conservation-policy>
- ¹¹ Mongabay (11 August 2017) Land-swap rule among Indonesian President Jokowi's latest peat reforms <https://news.mongabay.com/2017/08/land-swap-rule-among-indonesian-president-jokowis-latest-peat-reforms/> ; <https://www.wetlands.org/our-approach/peatland-treasures/sustainable-land-use/#read-more> ; <https://www.wetlands.org/casestudy/greening-the-pulp-and-paper-industry/>
- ¹² <http://environmentalpaper.org/2017/05/too-much-hot-air-a-new-report-from-epn-on-the-climate-change-impacts-of-paper-production-in-indonesia/>
- ¹³ Associated Press (20 December 2017)
- ¹⁴ Straits Times (25 December 2015) Asia Pulp & Paper: Suspended suppliers independently owned <http://www.straitstimes.com/business/companies-markets/asia-pulp-paper-suspended-suppliers-independently-owned>
- ¹⁵ Associated Press (21 December 2017) Pulp giant stirs new conflicts with Indonesian villagers. <https://www.apnews.com/6b58f7083e404ff59dd4700b4cf367a7/Pulp-giant-stirs-new-conflicts-with-Indonesian-villagers>
- ¹⁶ Straits Times (23 June 2017)
- ¹⁷ Eco-Business (14 November 2017) Development or destruction? An inside look at APP's mega paper mill. <http://www.eco-business.com/news/development-or-destruction-an-inside-look-at-apps-mega-paper-mill/>
- ¹⁸ Auriga, Forest Peoples Programme, Hutan Kita Institute, Jikalahari, KKI Warsi, Rainforest Action Network, Titian, Walhi Riau, Walhi Jambi, Wetlands International, Woods & Wayside International and WWF-Indonesia (1 November 2017) Evaluating the Environmental, Social and Corporate Governance Performance of Sinar Mas Group (SMG) and Royal Golden Eagle (RGE) Companies: Criteria and Indicator for Assessing and Verifying Performance. https://d2d2tb15kqhejt.cloudfront.net/downloads/criteria_indicators_for_assessing_verifying_smg_and_rge_performance_revisi_2_1.pdf
- ¹⁹ WWF-Indonesia (19 December 2017) WWF Advisory to Buyers and Investors of SMG/APP. http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf_id_19dec17_advisory_to_buyers_and_investors_of_smg_pp_final_1.pdf